

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini, kinerja suatu organisasi sektor publik banyak menjadi perhatian. Masyarakat mulai mempertanyakan nilai yang mereka terima untuk layanan atau kinerja yang diberikan oleh organisasi sektor publik karena mereka menjadi lebih cerdas dalam mengevaluasi efektivitas organisasi sektor publik. Masyarakat bertanya-tanya apakah uang yang digunakan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari program-program yang dilaksanakan. Karena kurangnya transparansi pada setiap akuntabilitas informasi keuangan yang dilakukan di dalam perusahaan, publik mulai kehilangan kepercayaan pada organisasi sektor publik. Banyak orang percaya bahwa lembaga pemerintah adalah sarang limbah dan sumber kebocoran dana. Hal ini menimbulkan fenomena dimana organisasi sektor publik lebih menekankan pada *value for money* yang secara bersamaan mempertimbangkan input, output dan outcome dalam organisasi sektor publik. (Wuwungan. T. G (2019))

Sebagai entitas sektor publik, tugas utama pemerintah adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena meningkatnya pengetahuan publik tentang penggunaan administrasi publik kini kinerja instansi pemerintah sedang menjadi sorotan. Tuntutan semakin meningkat terhadap kewajiban para penyelenggara atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka. UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 membentuk reformasi kelembagaan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, tanggap, dan akuntabel. Dalam situasi ini, tugas pemerintah adalah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atas Tindakan yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Organisasi di sektor publik berbeda dari sektor swasta dalam hal kualitas dan karakteristik mereka. Ciri khas dari organisasi sektor publik ini adalah tujuan yang ingin dicapai. Organisasi sektor publik dapat memberikan layanan kepada publik dalam hal untuk memenuhi semua jenis kebutuhan dan hak publik. Organisasi sektor publik memiliki tujuan yang bersifat non profit, sehingga melayani publik adalah tugas paling penting yang harus diselesaikan. Organisasi sektor publik bertanggung jawab kepada publik dan pamean. Anggaran yang dimiliki organisasi sektor publik terbuka untuk umum karena semua dana bersumber dari dompet publik. (Hartono (2014))

Penyusunan, pengolahan, pengaturan serta pengelolaan keuangan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan suatu organisasi, salah satunya yaitu organisasi sektor publik. Manajemen keuangan akan memiliki dampak positif atau negatif terhadap kelangsungan organisasi untuk tetap bertahan. Ketika organisasi sektor publik dikelola sesuai rencana dan tujuan yang berlandaskan karakteristik, maka organisasi sektor publik akan bertahan dan bahkan berkembang. Sebaliknya, organisasi sektor publik akan mengalami dampak negatif yaitu tujuan yang direncanakan sebelumnya tidak akan tercapai jika manajemen ceroboh atau tidak sesuai dengan tujuan organisasi.

Sejak ditetapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Sistem pengelolaan keuangan yang baik dan andal diperlukan untuk memastikan bahwa wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan pemerintah, diperlukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan pemerintah. Salah satu cara dalam mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan negara dan pengelolaan keuangan negara adalah dengan menggunakan konsep *Value for Money*.

Administrasi perekonomian daerah mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perkembangan suatu daerah untuk menentukan kegiatan perekonomian daerah. Oleh karena itu, pengelolaan ekonomi daerah harus dilaksanakan dengan efisiensi dan efektivitas keuangan atau *value for money* serta transparansi, akuntabilitas, pemerataan dan partisipasi masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya dapat mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Pemerintah daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya keuangan berupa dana yang sesuai dengan anggaran pemerintah daerah.

Dalam organisasi manapun, kinerja merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan. Setiap organisasi memiliki kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur kinerja. Hal ini dapat berupa apa saja tujuan atau target yang ingin dicapai. Untuk menilai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya secara ekonomis, efisien, dan efektif, pengukuran kinerja harus dibuat dengan mempertimbangkan karakteristik operasional organisasi. Kinerja merupakan salah satu isu yang sangat penting dipelajari dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan sejak dilaksanakannya penganggaran berbasis kinerja semua

pemerintah daerah harus menjalankan kewajibannya dengan baik dalam pemerintah daerah setelah ditetapkannya penganggaran berbasis kinerja. Diharapkan peningkatan tuntutan untuk akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit kerja negara, kementerian, dan lembaga pemerintah akan mengurangi pemborosan dan kehilangan dana serta mengungkap program yang tidak ekonomis.

Evaluasi kinerja sangat penting gunanya untuk mengetahui apakah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor telah melaksanakan program kerjanya dengan baik. Terutama realisasi terhadap program-program yang manfaatnya berhubungan dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor merupakan instansi yang kegiatannya berhubungan langsung dengan segala bidang kehidupan dan keberhasilannya didasarkan pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ketenagakerjaan. Dengan menggunakan analisis *value for money* dapat dilihat seberapa besar presentase efisiensi dan efektifitas atas perolehan target pendapatan dan biaya dengan membandingkan alat pengukuran kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.

Menurut Halim et al (2014) "*Value for Money* adalah konsep untuk mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas kinerja program, kegiatan dan organisasi, yaitu ekonomi terkait sejauh mana organisasi sektor publik meminimalkan input resource yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif, efisiensi terkait pencapaian output yang maksimum. Dengan input tertentu atau menggunakan input yang paling rendah untuk mencapai output tertentu dan efektivitas untuk mencapai hasil program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan".

Tujuan yang diinginkan berhubungan dengan pelaksanaan *value for money* yaitu, ekonomi dalam perolehan dan alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran. Semua informasi yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan antara output dan laporan keuangan. Permasalahan yang timbul adalah bahwa output tidak dapat langsung dibubungkan langsung ke output kinerja keuangan. Pemeriksaan tahunan tidak mensyaratkan kelengkapan informasi yang diterima tentang program sosial yang di danai. (Khalikussabir (2016))

Dalam organisasi sektor publik, kinerja keuangan merupakan topik penelitian yang sangat penting. Setelah diterapkannya penganggaran berbasis

kinerja setiap organisasi sektor publik khususnya pemerintahan dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mencapai kinerja keuangan yang baik. Menurut UU No 17 Tahun 2003, laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah harus memiliki informasi tambahan tentang kinerja instansi pemerintah, termasuk kinerja yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor merupakan salah satu dari organisasi sektor publik yang memberikan pelayanan ketenagakerjaan Kabupaten Bogor. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor menyusun laporan keuangan tahunan seperti laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang kemudian disampaikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pemerintah. Untuk melaksanakan seluruh kegiatan operasionalnya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor memiliki anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagai pengeluaran instansi.

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja lembaga pemerintah. Laporan realisasi anggaran yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dapat sangat membantu dalam menilai kinerja keuangan. Mereka memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada laporan neraca.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dapat kita lihat dari Laporan Realisasi Anggaran, merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintahan daerah yang sangat penting karena APBN merupakan tulang punggung pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian, serta evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk mencapai tiga tujuan. Pertama, pengukuran kinerja membantu pemerintah fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, yang pada akhirnya akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Yang kedua menyangkut alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan. Ketiga, menerapkan akuntabilitas publik dan komunikasi kelembagaan ditingkatkan. Oleh karena itu, laporan realisasi anggaran merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan yang sangat penting dan setiap instansi daerah. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor adalah salah satu instansi pemerintah yang ada di kabupaten Bogor yang memiliki tugas meningkatkan

kualitas tenaga kerja di Kabupaten Bogor, kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di bawah ini :

Tabel 1.1

Laporan Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor
Tahun 2020-2022

Tahun	Pendapatan		%
	Anggaran	Realisasi	
2020	3.510.000.000	4.825.071.488	147,27
2021	3.744.000.000	3.652.068.400	97,54
2022	6.447.600.000	0	0,00

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor

Tabel 1.2

Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor
Tahun 2020-2022

Tahun	Belanja		%
	Anggaran	Realisasi	
2020	17.165.128.796	13.966.344.484	96,57
2021	14.969.509.304	14.680.699.835	98,07
2022	23.612.649.918	15.876.663.897	94,73

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor

Dari tabel diatas terlihat bahwa pendapatan dan belanja daerah mengalami fluktuasi dan tahun ke tahun yaitu pendapatan pada tahun 2020 terealisasi 147,27% melampaui target anggaran, dan belanjanya terealisasi sebesar 96,57% Dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi pendapatan pada tahun 2021 menurun yaitu terealisasi 97,54% dan realisasi belanjanya 98,07% Dan realisasi pendapatan tahun 2022 belum bisa diukur karena realisasi pendapatan masuk ke pemerintah pusat dan untuk peraturan daerah nya masih disusun, dan untuk realisasi belanjanya sebesar 94,73%.

Laporan realisasi anggaran pendapatan pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami penurunan setiap tahunnya, sementara itu belanjanya daerah juga turun setiap tahunnya Jadi, secara umum bisa dilihat bahwa meskipun pengelolaan keuangannya belum efisien, tetapi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor sudah baik karena ekonomis dan efektif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganalisis Laporan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dengan menggunakan tiga pengukuran yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui kinerja keuangan suatu instansi yang bergerak di bidang ketenagakerjaan. Maka dari itu penulis mengambil judul **“Tinjauan Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan informasi di atas, penyusun merumuskan dan menentukan masalah utama yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2020-2022 jika ditinjau dari elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas?

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2020-2022 jika ditinjau dari elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas

1.4 Waktu dan Tempat Magang

Dalam pengerjaan dan penyusunan Tugas Akhir ini penulis melakukan kegiatan magang ini yang dilaksanakan di salah satu instansi pemerintahan yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor yang berlokasi di Jl. Bersih No. 2, Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914. Waktu dan pelaksanaan kegiatan magang ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak 13 Februari 2023 sampai dengan 12 Mei 2023, dengan jadwal kegiatan magang yaitu setiap hari Senin-Jumat pukul 08.00-15.00 WIB.